BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah upaya memajukan taraf hidup masyarakat, pembangunan di Indonesia terus dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Selain pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kualitas hidup individu juga menjadi perhatian utama. Pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk memperlancar akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, melainkan juga pada kualitas manusia. Oleh karena itu, perhatian terhadap kapasitas penduduk menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata (Tikson, 2005).

United Nations Development Programme (UNDP) mengidentifikasi dua dimensi utama dalam pembangunan manusia yaitu peningkatan kapasitas individu, termasuk umur panjang dan standar hidup yang layak, serta penciptaan kondisi yang mendukung kesejahteraan. Pembangunan yang menyeluruh dan merata dianggap sebagai kunci untuk mencapai keberlanjutan. (UNDP, 2015). Konsep pembangunan manusia yang dikenalkan oleh UNDP menyoroti jika tujuan utama pembangunan merupakan memperluas bermacam opsi warga. Perihal ini dilakukan dengan menjamin akses terhadap layanan kesehatan, pembelajaran, serta kehidupan yang layak. Guna alat ukur Pembangunan manusia digunakanlah IPM. IPM selaku penanda utama yang mencerminkan 3 aspek berarti: harapan hidup yang panjang serta sehat, tingkatan pembelajaran, dan mutu hidup yang mencukupi (Ekbangsetda, 2019).

Pada tahun 2015, PBB menginisiasi serangkaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang dirancang sebagai panduan global untuk mendorong perkembangan yang adil dan berkelanjutan di seluruh dunia sebagai pedoman yang akan digunakan dalam mencapai pembangunan global hingga tahun 2030. Dirumuskan sejak Konferensi Bumi Rio+20 tahun 2012 dengan melibatkan berbagai sektor dalam menangani isu-isu global (United Nations, 2023a). Pendekatan tersebut menitikberatkan pada perlunya menjaga keseimbangan antara aspek pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta upaya pelestarian lingkungan., serta mengandalkan kemitraan global dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan jangka panjang (Bappeda Kota Pontianak, 2017).

SDGs sebagai panduan pembangunan global, SDGs mengintegrasikan pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan (Daeli & Fithriana, 2020). Agenda ini bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, ketahanan sumber daya, serta ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. SDGs mendorong kerja sama lintas negara dan lintas sektor guna mewujudkan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih baik bagi seluruh Masyarakat (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Dengan melibatkan komitmen global, SDGs mendorong langkah-langkah terkoordinasi guna menghasilkan masa depan yang lebih adil serta berkepanjangan untuk segala umat manusia (Daeli & Fithriana, 2020). SDGs memuat 17 tujuan dan 169 sasaran yang mencakup berbagai dimensi pembangunan, antara lain sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dilakukan

dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh (Setiawati & Imamah, 2023).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang nyata dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diintegrasikan dengan 169 indikator SDGs. Tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam RPJMN dan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat hingga tahun 2030 (Isma, 2017). Upaya ini terbukti efektif, terlihat dari peningkatan peringkat pencapaian SDGs Indonesia dari peringkat 102 pada 2019 menjadi 75 pada 2023, dengan 76% indikator SDGs telah tercapai, yang mendukung Pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada pelestarian lingkungan (ekon.go.id, 2024).

Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, keberhasilan SDGs memerlukan keterlibatan Berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan kalangan akademisi, berperan penting dalam memastikan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Perpres ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Pengintegrasian SDGs dalam RPJMN menegaskan komitmen pemerintah untuk memikul tanggung jawab utama dalam implementasinya, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional. Pembangunan infrastruktur, memberikan peluang ekonomi baru, membantu pengurangan kemiskinan, serta berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial (Perpres No. 59, 2017). Salah

satu prioritas utama SDGs adalah peningkatan IPM, indikator yang menggambarkan sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tercapai, melalui akses terhadap pendapatan, layanan kesehatan, dan pendidikan. SDGs sebagai agenda global bertujuan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan hingga 2030, di mana pencapaian IPM menjadi indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022)

Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan memasukkan indikator-indikator SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah ke dalam RPJMD dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (localisesdgs, 2023). Implementasi SDGs di Jawa Timur berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan sosial yang adil, yang berdampak pada peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang lebih produktif. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, yang berhubungan erat dengan Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik masyarakat. Keberhasilan implementasi SDGs di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, pencapaian SDGs membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi taraf kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Timur (Ismowati et al., 2022).

Penelitian yang berjudul *"Path Analysis of Influence of Economic and Social Factors on the Human Development Index in South Sulawesi in 2022"* mendukung temuan ini dengan menunjukkan faktor UHH, RLS, dan TPAK terbukti memberikan dampak yang positif serta signifikan terhadap perkembangan IPM. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan pada ketiga dimensi tersebut berkontribusi signifikan terhadap taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi. Semakin tinggi angka harapan hidup, durasi pendidikan yang ditempuh individu akan semakin panjang, dan tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi akan berkontribusi pada peningkatan IPM di suatu wilayah (Parapa et al., 2023).

Gambar 1.1 Wilayah Dengan IPM Tertinggi di Jawa Timur

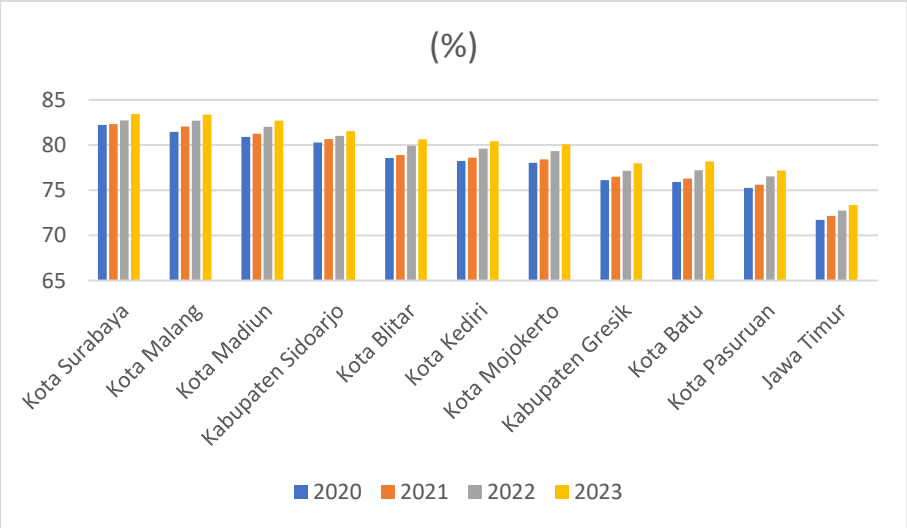

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Di Jawa Timur IPM menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 71,71 pada 2020 menjadi 73,38 pada 2023. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang menjadi kontributor utama terhadap angka IPM yang tinggi, dengan Surabaya tercatat mencapai IPM tertinggi di provinsi ini, yaitu 83,45 pada 2023, dan Malang dengan 83,39. Setelah itu, disusul dengan Kota Madiun dengan IPM 81,72 pada 2023 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023). Sepuluh

wilayah dengan IPM tertinggi di Jawa Timur mencakup; Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kota Batu, dan Kota Pasuruan.

Wilayah-wilayah di Jawa Timur dengan IPM tertinggi dapat berperan sebagai contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2016). Kota Surabaya, dengan IPM tertinggi di provinsi ini sebesar 83,45 pada 2023, menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dan program yang efektif di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduknya (Thejatim, 2023). Keberhasilan ini juga terlihat di daerah lain seperti Malang dan Madiun, yang mencatatkan IPM tinggi, yang menunjukkan pentingnya Program-program yang memprioritaskan peningkatan kualitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan bahwa peningkatan IPM terjadi di semua dimensi, mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, menjadikan wilayah-wilayah ini contoh bagi daerah lain dalam mencapainya (Bappeda Jatim, 2023).

IPM mengukur tiga dimensi mendasar pembangunan manusia, yakni derajat kesehatan, pendidikan, serta standar hidup memadai, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada poin 3 yang berbunyi “Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik” pada poin 4 yang berbunyi “Pendidikan Berkualitas,” dan pada poin 8 yang berbunyi “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Pembangunan bukan hanya mencakup pertumbuhan ekonomi namun harus mencakup peningkatan

kesejahteraan manusia juga, sehingga bukan hanya peningkatan *Output* ekonomi. Karena tenaga kerja dengan tingkat pembelajaran yang mumpuni serta kondisi fisik yang optimal cenderung lebih produktif. Pembangunan manusia yang berkualitas akan mempercepat kemajuan. Pembangunan manusia harus berkelanjutan, mencakup aspek inklusif seperti penciptaan lapangan kerja yang layak (Todaro & Smith, 2011).

IPM memperhitungkan aspek kehidupan layak, pendidikan, dan kesehatan, merupakan metrik penting untuk melacak kemajuan dalam pembangunan manusia. Ketiga dimensi ini sangat relevan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Pada SDGs 3, yang bertujuan untuk "Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik" Umur Harapan Hidup (UHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan, gizi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan, yang mempengaruhi panjang usia seseorang (KEMENKES, 2023). Semakin tinggi UHH menunjukkan kualitas kesehatan yang lebih baik, yang menjadi faktor utama dalam pembangunan manusia dan berkontribusi pada peningkatan IPM (Sen, 1999).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan sebagai indikator untuk tujuan "Pendidikan Berkualitas" SDGs 4 karena pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang memberikan akses ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan IPM dan kualitas hidup. (Becker, 1993). Pendidikan yang lebih tinggi, yang tercermin dalam RLS yang lebih lama, menjadi variabel penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Indikator dari Tujuan 8 SDGs "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ini menggambarkan sejauh mana individu dalam angkatan kerja memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka *(International Labour Organization*, 2020b).

Dalam penelitian ini, RLS berfungsi sebagai variabel intervening atau mediasi penghubung pengaruh UHH dan TPAK terhadap IPM. Pendidikan yang lebih tinggi dapat tercermin dalam RLS yang dimana hal tersebut memberikan pemahaman masyarkat terkait kesehatan serta memperbesar peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka (Parapa et al., 2023). Dengan demikian, ketiga indikator UHH, RLS, dan TPAK saling terkait dalam mendukung pembangunan manusia yang lebih berkelanjutan dan inklusif, berkontribusi langsung pada peningkatan IPM.

Gambar 1.2 Umur Harapan Hidup Hasil *Long Form* SP2020 Menurut Kabupaten/Kota

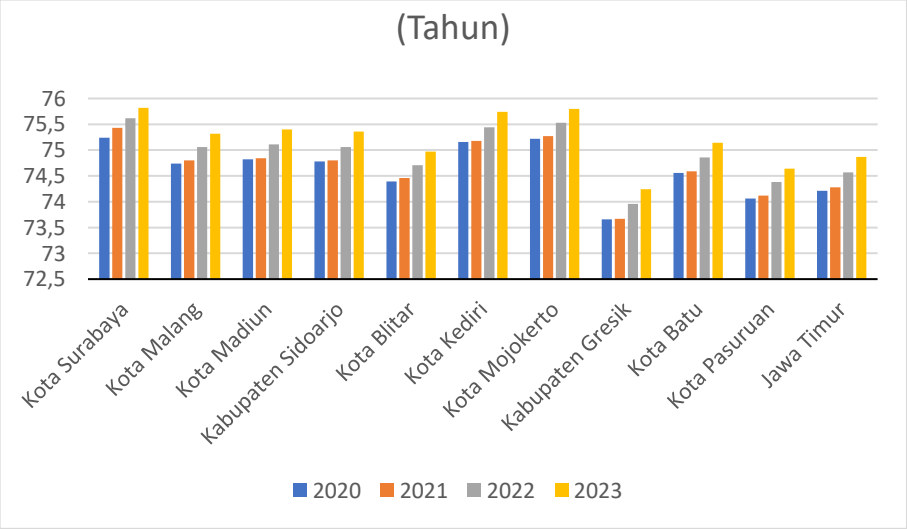

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada SDGs 3, Umur Harapan Hidup (UHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mempengaruhi panjang usia seseorang (KEMENKES, 2023). Kualitas kesehatan masyarakat berkorelasi positif dengan UHH, dan ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup individu serta kinerja dan efisiensi pekerja. Pembangunan manusia berkelanjutan menitikberatkan pada perbaikan mutu kehidupan secara holistik, di mana derajat kesehatan yang optimal menjadi salah satu elemen krusial yang mendukung pencapaiannya (Sen, 1999). Oleh karena itu, peningkatan UHH berkontribusi langsung pada peningkatan IPM karena meningkatkan taraf hidup individu dan memperpanjang usia harapan hidup yang produktif.

Namun meskipun UHH menjadi indikator penting dalam perhitungan IPM, data menunjukkan adanya variasi dalam hubungan antara UHH dan IPM di beberapa daerah di Jawa Timur. Berdasarkan *Long Form Sensus* Penduduk 2020 (SP2020), Kota Surabaya memiliki IPM dan UHH yang tinggi, sementara beberapa daerah seperti Kota Blitar dan Kota Pasuruan memiliki IPM tinggi meskipun UHH-nya tidak masuk dalam sepuluh besar wilayah dengan UHH tertinggi. Di sisi lain, Kabupaten Gresik, meskipun memiliki IPM tinggi, justru memiliki UHH yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota dengan IPM terendah di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023).

Perbedaan yang muncul ini mengindikasikan bahwa selain faktor ekonomi, terdapat elemen lain yang turut memengaruhi tingkat kesehatan di suatu wilayah, seperti kemudahan akses terhadap layanan kesehatan serta pola hidup yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui kebijakan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 3, yang bertujuan untuk menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua. Kebijakan semacam ini dapat berdampak langsung pada peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) serta kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya turut meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam dimensi kesehatan. (UNICEF, 2023).

Umur Harapan Hidup (UHH) yang dihasilkan dari SP2020 memiliki perbedaan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) biasa. UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup sejak lahir dan merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan masyarakat. Berbeda dengan UHH biasa yang sering kali didasarkan pada data yang lebih umum, Umur Harapan Hidup dalam SP2020 diperoleh melalui survei yang lebih mendalam, melibatkan pengumpulan data rinci tentang faktor-faktor kematian dan kesehatan di berbagai kelompok usia (UNFPA, 2022). Dengan demikian, UHH dari SP2020 dapat dianggap sebagai data yang lebih akurat dan representatif untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah dibandingkan dengan umur harapan hidup biasa. Oleh karena itu, alam penelitian ini, digunakan data UHH dari *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yang juga menjadi salah satu alasan pemilihan periode penelitian selama empat tahun terakhir. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dengan memastikan akses yang efektif, terjangkau, dan merata terhadap layanan kesehatan, negara dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial. Langkah ini juga memperkuat kualitas SDM

secara keseluruhan, hal ini pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kenaikan IPM (Daeli & Fithriana, 2020). Individu dengan akses lebih besar ke layanan kesehatan cenderung menunjukkan stabilitas emosional dan kebugaran jasmani yang lebih unggul, sehingga mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih optimal. Hal ini berpeluang untuk menjadi individu yang lebih produktif serta aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi, baik yang berlangsung di zona resmi ataupun informal, mencakup segala kegiatan yang terpaut dengan penciptaan, distribusi, serta mengkonsumsi benda serta jasa dalam masyarakat. Produktivitas yang meningkat tersebut tidak hanya berdampak meningkatkan kesejahteraan manusia, namun perannya juga menjadi faktor penunjang yang berpengaruh nyata terhadap akumulasi laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, yang pada akhirnya memperkuat dimensi ekonomi dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. (United Nations, 2023).

Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota

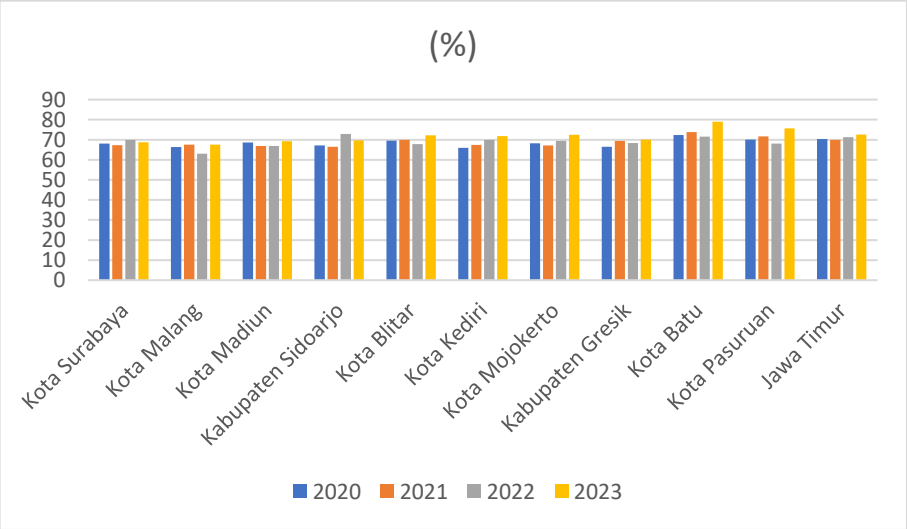

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada SDGs 8, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator yang mengukur andil tenaga kerja dalam ekonomi. TPAK

mencerminkan tingkat kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Menurut *International Labour Organization* (2020b), partisipasi yang lebih tinggi dalam angkatan kerja mengindikasikan tingginya kesempatan bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup mereka. Partisipasi yang tinggi dalam dunia kerja memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Empat tahun terakhir, TPAK di Jawa Timur menunjukkan peningkatan meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara peringkat TPAK dengan IPM, UHH, dan RLS. Misalnya, Kota Surabaya, yang memiliki IPM tertinggi, justru menempati peringkat ke-34 dalam TPAK dengan 68,73% pada 2023, sementara Kota Madiun, yang menempati peringkat kedua IPM, berada di urutan ke-35 dengan 69,29%. Sebaliknya, beberapa kabupaten/kota dengan IPM rendah justru mencapai TPAK yang tinggi. Kota Batu menjadi pengecualian, karena meskipun memiliki IPM yang tinggi, kota ini menempati peringkat ke-6 dalam TPAK, yang artinya masih termasuk dalam 10 tertinggi (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023).

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan semakin banyak individu yang terlibat dalam angkatan kerja, yang memungkinkan mereka untuk memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, penghasilan yang konsisten dan akses yang lebih adil ke perawatan kesehatan dan pendidikan. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi serta sosial

(Bappenas, 2021). Peningkatan TPAK berperan dalam meningkatkan IPM, terutama melalui akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan stabil, dan perbaikan kualitas hidup (Ferawati, 2018). Ketersediaan pekerjaan yang layak memungkinkan individu untuk memperoleh penghasilan yang memadai, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas lebih tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, secara tidak langsung ditingkatkan dengan memiliki akses yang lebih baik ke dua sektor penting ini. Akibatnya, bahkan jika tujuan utama SDGs 8 adalah penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya terhadap taraf kesejahteraan hidup serta pencapaian pembangunan manusia tetap menjadi elemen esensial yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan yang berorientasi keberlanjutan. (Bappeda Jogja, 2023b).

Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota

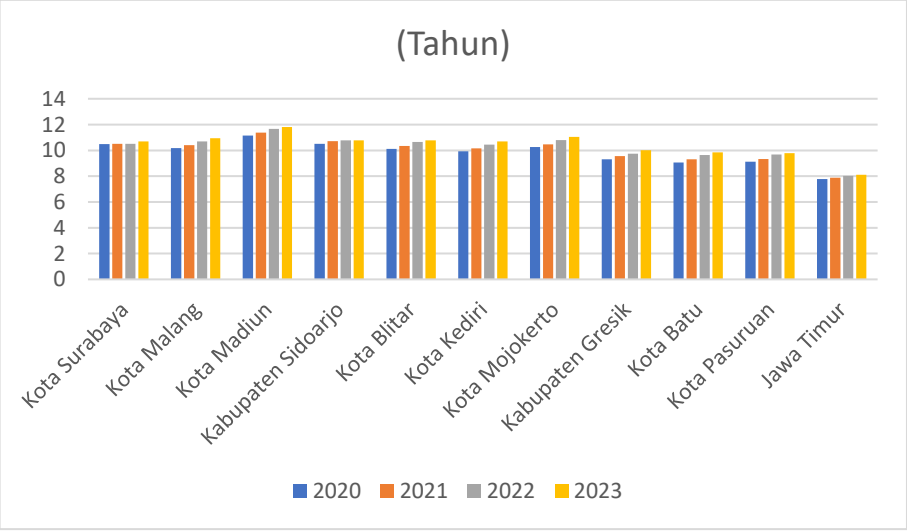

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh masyarakat di suatu daerah yang diukur dalam rata-rata jumlah tahun belajar, merupakan salah satu indikator dalam

dimensi pendidikan dari IPM. Peningkatan RLS menunjukkan akses pendidikan yang lebih baik serta peningkatan kapasitas manusia dalam suatu wilayah. Di Jawa Timur, wilayah dengan IPM tertinggi juga memiliki RLS yang tinggi, meskipun terjadi perubahan peringkat antarwilayah. Kota Madiun menempati posisi pertama dalam RLS dengan nilai 11,82 pada 2023, disusul Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto. Kota Surabaya, yang memiliki IPM dan Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi, berada di peringkat kelima pada RLS dengan nilai 10,70, sementara Kota Malang menempati peringkat keempat dengan nilai 10,94 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023).

Pencapaian SDGs 4 meningkatkan partisipasi pendidikan, hasil pembelajaran, dan akses bagi kelompok terpinggirkan, yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian agenda 2030 (United Nations, 2023). Pendidikan yang berkualitas juga mempengaruhi kemampuan individu dalam produktifitas dan kreatifitas yang lebih baik serta memperkuat kemampuan konsumsi masyarakat, yang secara tidak langsung berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan perekonomian. serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan angka IPM, yang pada gilirannya mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan di suatu wilayah (Yusuf et al., 2022).

Variabel intervensi yang menghubungkan dampak UHH dan Tingkat TPAK terhadap IPM adalah RLS, salah satu indikator dalam SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Selain itu, UHH yang lebih tinggi dapat berdampak pada RLS dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memfasilitasi

akses yang lebih besar ke perawatan kesehatan, yang pada gilirannya memotivasi orang untuk mencari pendidikan dan mengembangkan keterampilan baru. Kesesuaian ini tercermin dalam perspektif Teori Modal Kesehatan, yang menegaskan bahwa, kesehatan adalah salah satu bentuk modal manusia yang mendukung produktivitas dan perkembangan individu. Kehidupan yang sehat serta umur yang Panjang juga membantu Masyarakat untuk mampu menempuh Pendidikan yang lebih berkualitas. Hal itu juga sejalan dengan teori Modal Kesehatan yang dimana menyatakan bahwa kesehatan merupakan suatu bagian dari modal manusia (Marmot, 2005). RLS berfungsi sebagai penghubung, karena pendidikan tinggi mendukung gaya hidup sehat dan meningkatkan produktivitas.

Gambar 1. 5 Rata-Rata IPM, UHH, RLS, dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota

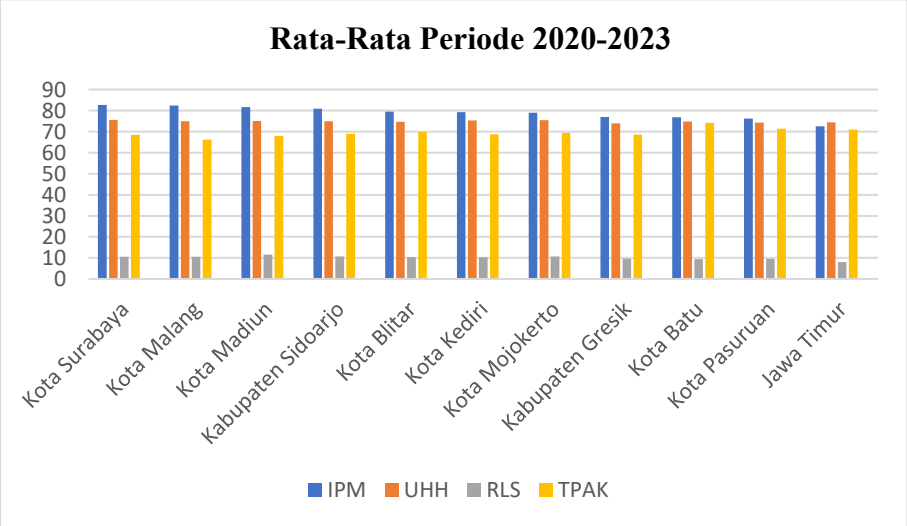

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Mengacu pada data mengenai IPM, yang mencakup komponen seperti UHH, RLS, dan TPAK pada sepuluh daerah dengan capaian IPM tertinggi di Jawa Timur, terdapat pola yang menarik. Kota Surabaya, dengan IPM tertinggi 82,68%, justru memiliki TPAK yang relatif rendah, yaitu 68,52%. Hal ini

menunjukkan bahwa wilayah dengan IPM tinggi tidak selalu diikuti oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi. Sebaliknya, RLS lebih konsisten dengan IPM, di mana Kota Madiun menempati peringkat pertama dengan nilai RLS 11,50 tahun. Sementara itu, UHH relatif merata di wilayah dengan IPM tinggi, dengan Kota Surabaya mencatat angka tertinggi 75,52 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tiga poin *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu SDGs 3 "Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik" yang diwakili oleh UHH dari *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020), SDGs 4 "Pendidikan Berkualitas" yang diwakili oleh RLS, dan SDGs 8 "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" yang diwakili oleh TPAK. Pemilihan periode 2020-2023 sebagai fokus penelitian didasarkan pada relevansi data dengan tren pembangunan manusia terkini, terutama setelah dampak pandemi COVID-19. Selama periode ini, pemerintah juga telah mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam RPJMN, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur dibuat lebih menyeluruh dan representatif dengan memusatkan analisis pada 10 lokasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif karena pemilihan daerah dengan pencapaian IPM yang luar biasa dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu aspek penting dari penelitian ini adalah memfokuskan pada RLS sebagai variabel intervening yang menghubungkan pengaruh UHH dan TPAK terhadap IPM. Dengan memediasi hubungan tersebut diharapkan dapat memperjelas mekanisme yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menawarkan saran taktis yang akan membantu pencapaian SDGs dan mempercepat pembangunan berkelanjutan Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencakup rumusan masalah lainnya, antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh Umur Harapan Hidup (SDGs 3 “Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDGs 8 “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
4. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) memediasi pengaruh Umur Harapan Hidup (SDGs 3 “Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?

5. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) memediasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDGs 8 “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mencakup tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat Umur Harapan Hidup (SDGs 3 “Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDGs 8 “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
4. Untuk mengetahui apakah Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) memediasi pengaruh Umur Harapan Hidup (SDGs 3 “Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik”) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui apakah Rata-Rata Lama Sekolah (SDGs 4 “Pendidikan Berkualitas”) memediasi pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDGs 8 “Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada isu-isu yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan fokus yang jelas dan menghasilkan temuan yang memberikan manfaat maksimal. Penelitian ini tidak berfokus pada seluruh poin dalam SDGs, namun hanya berfokus pada poin-poin SDGs 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan), SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), serta SDGs 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Pada SDGs 3, penelitian ini menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator untuk mencerminkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk SDGs 4, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dijadikan sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh antara UHH dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan untuk SDGs 8, penelitian ini mempertimbangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator yang menunjukkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji apakah UHH dan TPAK melalui RLS sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 10 wilayah dengan IPM tertinggi di Jawa Timur pada periode tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis.

1. **Manfaat Teoritis:**

   Diharapkan hasil penelitian ini akan secara signifikan memajukan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pembangunan manusia dan variabel yang mempengaruhi pencapaiannya. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang teori pembangunan manusia dengan meneliti hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan faktor pengaruh lainnya. Selain itu, dengan mempertimbangkan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan IPM, temuan penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pencapaian SDGs dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian mendatang yang fokus pada pembangunan manusia, analisis kebijakan publik, dan upaya pencapaian SDGs di tingkat nasional maupun global.

2. **Manfaat Praktis:**

   Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang signifikan bagi para pengambil kebijakan dalam membangun strategi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat membuat rencana yang lebih terfokus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum dengan memeriksa beberapa elemen yang mempengaruhi IPM.

3. **Manfaat Sosial:**

   Selain itu, penelitian ini diharapkan akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan manusia yang

berkelanjutan. Dimaksudkan bahwa dengan memahami ide dan faktor yang terkait dengan pembangunan manusia. Diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam banyak inisiatif pembangunan yang sekarang ada.